

RINGKASAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hampir selalu terdapat di setiap negara. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sukar dihadapi. Permasalahan kemiskinan tak lepas dari keberadaan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar). Perda nomor 16 tahun 2015 (Bab XI, pasal 39) berisi larangan untuk mengemis dan mengamen, serta larangan memberi uang atau barang kepada PGOT, yang mana larangannya terwujud dalam sebuah papan peringatan, yang terpasang di beberapa tempat, seperti terminal, perempatan, alun-alun, dan sebagainya. Penelitian ini membahas tentang Sikap Masyarakat Mengenai Perda nomor 16 tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan sikap masyarakat mengenai Perda nomor 16 tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan milik Herbert Mead. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Sementara sasaran penelitian ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah di bentuknya Perda nomor 16 tahun 2015, yaitu dikarenakan banyaknya PGOT yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Banyumas, khususnya di perkotaan seperti wilayah Purwokerto Timur. Kawasan perkotaan dianggap sebagai tempat strategis bagi para PGOT untuk mencari nafkah. Mulai dari di emperan toko hingga di perempatan-perempatan jalan. Hal tersebut dianggap dapat membahayakan PGOT dan juga mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum, oleh sebab itu dikeluarkan Perda tersebut sebagai upaya untuk menanggulangi penyakit masyarakat.

Sikap masyarakat mengenai Perda nomor 16 tahun 2015 ada dua, yaitu yang tidak menerima dan menerima Perda. Masyarakat yang tidak menerima Perda berasumsi bahwa Perda tersebut bertentangan dengan kepercayaan dan hati nurani. Masyarakat percaya bahwa memberi dan membantu sesama adalah hal yang baik. Disisi lain, ada masyarakat yang menerima Perda tersebut, akan tetapi mereka tetap memberi kepada PGOT. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa bahwa belum adanya solusi tepat PGOT untuk mendapat pekerjaan yang layak dan hidup lebih baik.

Permasalahan PGOT merupakan pekerjaan rumah bersama, oleh karena itu disarankan pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam menjalankan aturan (dalam hal ini Perda nomor 16 tahun 2015) agar terciptanya tujuan bersama. Masyarakat berhak untuk mengikuti hati nuraninya, akan tetapi dalam hal ini perlu adanya kesadaran hukum yang mana Perda tersebut seharusnya ditaati sebagai aturan hukum yang sah dan landasan bagi masyarakat.

Kata kunci : Kemiskinan, Sikap Masyarakat, Peraturan Daerah

SUMMARY

Poverty is a problem that is always present in every country and is a difficult problem faced, the problem of poverty can not be separated from the existence of PGOT (beggar, vagrant, and neglected). regional regulation number 16 of 2015 (chapter XI, article 39) contains a ban on begging and singing and prohibitions to give money or goods to PGOT which have been announced in various public places. This study discusses the attitude of the community regarding the regional regulation number 16 of 2015 on the prevention of community diseases. This research was conducted with the aim to describe the attitude of the community regarding the regional regulation no 16 of 2015 about the prevention of community disease in the regency of Banyumas. the theoretical basis used in this study is Herbert Mead's theory of action used. The method used in this study is qualitative descriptive data obtained through interviews, direct observation and documentation. While the target of research is determined by using purpose sampling.

The results of research show that the history of the establishment of regional regulation number 16 of 2015, which is due to the many PGOT that roam the region banyumas regency, especially in urban areas such as eastern purwokerto. the urban area is considered as a strategic place for PGOT to earn a living. From the periphery of the store to the intersections of the road. It is considered to be harmful to PGOT and also disrupt traffic and public order, therefore the issuance of the regional regulations as an effort to cope with community ills.

Public attitudes on regional regulation No. 16 of 2015 are two, those that do not accept and accept the regulation. The community that does not accept the regulation assumes that the regulation is contrary to the belief and conscience. people believe that giving and helping others is a good thing. In the other side, there are people who accept the regulation, but they still give to PGOT. This is because the community feels that there is no PGOT right solution to get a decent job and a better life.

The problem of PGOT is the homework together, therefore it is recommended that the government and the community synergize each other in running the regulations (local regulation number 16 of 2015) in order to create common goals. The community is entitled to follow their conscience, but in this case there is a need for legal awareness which is it should be obeyed as a legal rule of law and a foundation for society.

Key Words : Poverty, Attitude Of Society, Local Regulation